

**PENGARUH KONTRIBUSI PENERIMAAN
PAJAK REKLAME, PAJAK HOTEL DAN
PAJAK RESTORAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA BATAM**

SKRIPSI



**Oleh:
Agustina Manalu
140810269**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

**PENGARUH KONTRIBUSI PENERIMAAN
PAJAK REKLAME, PAJAK HOTEL DAN
PAJAK RESTORAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh
Agustina Manalu
140810269**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Agustina Manalu
NPM/NIP : 140810269
Fakultas : ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat dengan judul:

PENGARUH KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME, PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATAM

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 09 Agustus 2018

Agustina Manalu

140810269

**PENGARUH KONTRIBUSI PENERIMAAN
PAJAK REKLAME, PAJAK HOTEL DAN
PAJAK RESTORAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi**

**Oleh:
Agustina Manalu
140810269**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 05 September 2018

Desrini Ningsih, S.Pd., M.E

Pembimbing

ABSTRAK

Pajak daerah dan retribusi daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Diantara sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah, hasil pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang potensial dan memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut. Pajak reklame, hotel dan restoran merupakan sektor potensial bagi peningkatan ataupun pertumbuhan di daerah. Oleh sebab itu diharapkan penerimaan yang efektif, dan juga diharapkan adanya kontribusi yang cukup bagus dari penerimaan pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran ini. Objek pada penelitian ini adalah Dinas Pendapatan daerah Kota Batam, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah Kota Batam. Sampel dalam penelitian ini berupa data realisasi anggaran pendapatan belanja daerah Kota Batam sejak tahun 2012 sampai 2017. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji regresi linier berganda, uji t, uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam. Secara simultan pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam.

Kata kunci: Kontribusi Pajak reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

Local taxes and regional retributions, namely the regional financial resources that are excavated from the region concerned, which consists of the results of local taxes, the results of regional retribution, the results of management of separated regional assets and other legitimate local revenue. Among sources of revenue from local revenues, local tax results are a potential source of regional revenue and play a very important role in increasing the region's original income. Advertise taxes, hotels and restaurants are potential sectors for increase or growth in the region. Therefore, effective reception is expected, and it is also expected that there will be a good contribution from advertisement tax receipts, hotel taxes and restaurant taxes. The object of this research is the Regional Revenue Service of Batam City. This research aims to find out the advertisement tax revenue, hotel tax and restaurant tax on the original revenue of Batam City. Independent variables in this study are advertisement tax, hotel tax, and restaurant tax. The dependent variable in this study is the original revenue of Batam City. The sample in this study is the realization data of regional expenditure budget of Batam City from 2012 to 2017. The data analysis technique used is multiple linear regression test, t test, F test. The results show that partially advertisement tax, hotel tax, and tax restaurants have a significant effect on the original revenue of Batam City. Simultaneously billboard taxes, hotel taxes and restaurant taxes have a significant effect on the original revenue of Batam City.

Keywords: *advertisement tax contribution, hotel tax, restaurant tax, local revenues*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam
2. Bapak Suhardianto, S.Hum., M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora di Universitas Putera Batam.
3. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.SI. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam yang juga mendampingi dan mendukung kami.
4. Ibu Desrini Ningsih, S.Pd., M.E. selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

5. Seluruh Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis sejak awal hingga akhir perkuliahan.
6. Kedua orang tua penulis, E. Manalu dan L. Tampubolon, yang selalu memberikan doa dan dukungan yang tak pernah putus hingga membuat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kelompok tumbuh bersama (KTB LOVE), Unjur Sariana Simatupang, Debora Pestaria Dongoran, Novita Andarwaty Sitorus yang selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam penyusunan skripsi.
8. Kepada UKM Kristen Universitas Putera Batam yang telah mendoakan dan mendukung penulis dalam penyusunan skripsi.
9. Kepada Wiwit Panggabean dan teman-teman seperjuangan penulis yang telah mendukung penulis dalam penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati, Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan, Amin

Batam, 08 Agustus 2018

Agustina Manalu

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR RUMUS	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Batasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	8
1.6.1 Manfaat Teoritis	8
1.6.2 Manfaat Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah	10
2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah	10
2.1.1.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	10
2.1.2 Pajak Reklame.....	11
2.1.2.1 Objek Pajak Reklame	11
2.1.2.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame	14
2.1.2.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame	15
2.1.2.4 Tarif Pajak Reklame.....	16
2.1.3 Pajak Hotel	16
2.1.3.1 Objek Pajak Hotel	16
2.1.3.2 Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak Hotel	17
2.1.3.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel	17
2.1.4 Pajak Restoran.....	17
2.1.4.1 Objek Pajak Restoran.....	18
2.1.4.2 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran	18
2.1.4.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran	18
2.2 Penelitian Terdahulu	19
2.3 Kerangka Pemikiran.....	24
2.4. Hipotesis.....	26

BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Desain Penelitian.....	34
3.2 Populasi dan Sampel	34
3.2.1 Populasi.....	34
3.2.2 Sampel.....	34
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.4 Metode Analisis Data.....	35
3.4.1 Analisis Deskriptif	36
3.4.2 Uji Asumsi Klasik	37
3.4.2.1 Uji Normalitas.....	37
3.4.2.2 Uji Multikolinearitas	38
3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas.....	40
3.4.2.4 Uji Autokorelasi.....	41
3.5.3 Uji Pengaruh.....	42
3.5.3.1 Uji linier Berganda.....	42
3.5.4 Uji Hipotesis	43
3.5.4.1. Uji Statistik t (Parsial).....	44
3.5.4.2 Uji Statistik F (Simultan).....	45
3.5.3. Koefisien Determinasi.....	46
3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	47
3.6.1 Lokasi Penelitian.....	47
3.6.2 Jadwal Penelitian.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
4.1. Hasil Penelitian	48
4.1.1. Analisis Deskriptif Variabel.....	48
4.1.2. Uji Asumsi Klasik	50
4.1.2.1. Uji Normalitas.....	50
4.1.2.2. Uji Heteroskedastisitas.....	54
4.1.2.3. Uji Multikolinieritas.....	56
4.1.2.4. Uji Autokorelasi.....	57
4.1.2. Uji Pengaruh	58
4.1.2.1. Metode Regresi Linier Berganda	58
4.1.3 Uji Hipotesis	60
4.1.3.1 Hasil uji t (Parsial)	60
4.1.3.2 Uji F (Simultan)	61
4.1.3.3 Uji Analisis Determinasi	63
4.2 Pengaruh Pajak reklame terhadap Pendapatan asli daerah	63
4.2.2 Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan asli daerah	64
4.2.3 Pengaruh Pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah.....	65
4.2.4 Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah	66

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahu.....	23
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	33
Tabel 3.2 Durbin Watson.....	42
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian.....	47
Tabel 4.1 Hasil Uji Analisis Deskriptif.....	48
Tabel 4.2 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov.....	53
Tabel 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	55
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas.....	56
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi.....	57
Tabel 4.6 Hasil Uji Linier Berganda.....	58
Tabel 4.7 Hasil Uji T.....	60
Tabel 4.8 Hasil Uji F.....	62
Tabel 4.9 Hasil Uji Determinasi.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	26
Gambar 3.1 Komponen dan Proses Penelitian Kuantitatif	30
Gambar 4.1 P-Plot Standardized.....	51
Gambar 4.2 Bell Shaped Curve.....	52
Gambar 4.3 P-Plot Standardized.....	54

DAFTAR RUMUS

	Halaman
Rumus 3.1 Uji Autokorelasi.....	42
Rumus 3.2 Regresi Linier Berganda.....	43
Rumus 3.2 Parsial (T)	44
Rumus 3.3 Simultan (F)	45
Rumus 3.4 Koefisien Determinasi.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang penelitian

Negara Indonesia merupakan sebuah negara besar di kawasan Asia bahkan Dunia. Indonesia terdiri dari jajaran pulau yang terbentang luas dari Sabang sampai dengan Marauke, yang mana didalam pulau tersebut terdapat beberapa Provinsi, untuk saat ini sudah terdapat 34 Provinsi yang terdapat di Indonesia. Yang mana di dalam Provinsi tersebut terdapat suatu daerah berupa kabupataen/kota yang termasuk bagian dari Provinsi tersebut, salah satunya ialah Kota Batam. Kota Batam sendiri merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau, yang terdapat di pulau Sumatra. Letak Kota Batam bisa dikatakan cukup strategis, karena Kota Batam langsung berdekatan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Yang mana diharapkan dari letak strategis tersebut Kota Batam dapat terus menggali semua potensi yang ada, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Batam ataupun kepri maupun pertumbuhan ekonomi nasional.

Dinas Pendapatan Kota Batam merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, urusan pemerintahan bidang pendapatan, mengemban suatu tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dengan menjalankan fungsi perumusan kebijakan, memberi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas dan pengelolaan urusan ketatausahaan dinas pendapatan.

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009) tentang pajak daerah dan retribusi daerah yaitu sumber keuangan daerah yang di gali dari daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Diantara sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah, hasil pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang potensial dan memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut. Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2000) tentang perubahan atas (Undang-undang Republik Indonesia, 1997) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Menurut (Undang-undang Republik Indonesia, 2009) pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 3 badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Berdasarkan (Presiden Republik Indonesia, 2009) Pajak Kabupaten/Kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan,

pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air dan tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak daerah itu sendiri ditetapkan oleh daerah itu sendiri berdasarkan peraturan daerah tersebut guna untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Ini bertujuan agar setiap objek pajak yang terlibat dalam pajak daerah dapat mematuhi dan menyesuaikan dengan peraturan daerah tentang ketetapan pajak daerah tersebut, dan bilamana terdapat kecurangan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan maka akan diberikan teguran maupun sanksi atas kecurangan yang dilakukan yang berpedoman kepada Peraturan Daerah. Untuk Kota Batam sendiri peraturan tentang pajak daerah diatur oleh Dispenda Kota Batam, yang mana salah satu dari peraturan ini tertuang dalam (Walikota, n.d.-a) tentang petunjuk pelaksanaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, dan pajak parkir kota batam.

Pajak reklame, hotel dan restoran merupakan sektor potensial bagi peningkatan ataupun pertumbuhan di daerah. Oleh sebab itu diharapkan penerimaan yang efektif, dan juga diharapkan adanya kontribusi yang cukup bagus dari penerimaan pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran ini. Menurut (Walikota, n.d.-b) Tentang petunjuk pelaksanaan Pajak Reklame, reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk susunan corak dan ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan,

mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum. Sedangkan Pajak Reklame merupakan adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Kota Batam saat ini berdasarkan rekapitulasi wajib pajak daerah kota batam tahun 2017 dari sektor Pajak reklame, hotel dan restoran. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam triwulan pertama tahun 2017 Rp 180,567 miliar dari target 1,16 triliun. Jika dipersentasekan capaian tersebut yakni 15,56 persen. Berdasarkan data, dua sumber penerimaan PAD andalan masih minim. Pertama, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) baru tercapai Rp 34,353 miliar dari target Rp 342,567 miliar. Kedua, target Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) Kota Batam baru tercapai Rp 8,104 miliar dari target Rp 131,579 miliar. Sumber lain penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni dari pajak hotel Rp 22,115 miliar dari Rp 117,250 miliar. Pajak Restoran, tercapai Rp 13,709 miliar dari target Rp 67,157 miliar. Sedangkan pajak hiburan sebesar Rp 5,847 dari target Rp 25,174 miliar. Pajak reklame sebesar 1,564 miliar dari target Rp 8,034 miliar dan Pajak penerangan jalan umum tercapai Rp 33,971 miliar dari target Rp 162,163 miliar. Parkir khusus dengan capaian Rp 1,585 miliar dari target Rp 12 miliar dan penerimaan dari mineral logam bukan batuan tercapai sekitar Rp 514 juta dari target Rp 8,485 miliar. (Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam).

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah di antaranya, penerimaan bagi hasil pajak dari pemerintah pusat dimana

realisasinya tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Hal ini dikarenakan banyaknya dana alokasi umum untuk pembangunan infrastruktur, Dalam menjalankan otonomi daerahnya, pemerintah Kota Batam dituntut untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Pengembangan sistem perpajakan daerah di Kota Batam dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, peningkatan kebutuhan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Kedua, terjadinya perkembangan teknologi informasi, termasuk teknologi dalam rangka transaksi-transaksi bisnis. Salah satunya sistem pembayaran pajak oleh wajib pajak yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Batam untuk mendorong percepatan prosedur pembayaran pajak daerah.

Penelitian terdahulu oleh (Kamarullah & Handayani, 2016) dengan judul “Pengaruh Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya”, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pajak hotel dan restoran selama tahun 2012 - 2014 sebesar 13.18% dan 12.35%. Pajak hotel dan restoran dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari persentase yang disumbangkan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah hanya sebesar 5.49% dan 7.50%. Sedangkan, untuk pajak hotel dan restoran rata-rata tingkat efektivitas yang diperoleh sebesar 106.44% dan 105.27%. Hal tersebut membuktikan bahwa tingkat efektivitas sudah sangat maksimal.

Penelitian terdahulu oleh (Mentari, Rahayu, 2015) dengan judul “Pengaruh Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli

Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009-2013) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh, yaitu pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah sebesar 73,6% dan secara parsial pajak hotel berpengaruh signifikan secara positif terhadap pendapatan asli daerah dan pajak restoran berpengaruh signifikan secara positif terhadap pendapatan asli daerah.

Berawal dari pemikiran di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah tersebut dengan judul **“PENGARUH KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME, PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATAM”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena masalah yang terjadi dalam penelitian ini adalah:

1. Masalah dalam pengelolaan pendapatan daerah dimana penerimaan bagi hasil pajak dari pemerintah pusat realisasinya tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Hal ini di karenakan banyaknya dana alokasi umum untuk pembangunan infrastruktur.
2. Peningkatan kebutuhan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
3. Teknologi dalam transaksi-transaksi bisnis. Salah satunya pembayaran pajak oleh wajib pajak yang perlu ditindaklanjuti oleh untuk mendorong percepatan prosedur pembayaran pajak daerah.

4. Lemahnya keuangan daerah atau anggaran di Kota Batam sehingga berdampak pada pendapatan asli daerah Kota Batam.

1.3 Batasan Masalah

Supaya pembahasan fokus dan tetap mengarah sesuai judul, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Dalam hal ini peneliti berfokus meneliti pengaruh penerimaan pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam periode 2012-2017. Objek penelitian Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Batam.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam tahun 2012-2017?
2. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam tahun 2012-2017?
3. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam tahun 2012-2017?
4. Bagaimana pengaruh penerimaan reklame, pajak hotel, dan pajak restoran secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam tahun 2012-2017?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam tahun 2012-2017.
2. Untuk mengetahui penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam tahun 2012-2017.
3. Untuk mengetahui penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam tahun 2012-2017.
4. Untuk mengetahui penerimaan pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam tahun 2012-2017.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu akuntansi dan perpajakan, untuk mengetahui bagaimana perkembangan pendapatan hasil daerah di kota Batam.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Dispenda

Sebagai sumbangan pemikiran untuk meningkatkan pendapatan. Dan sebagai masukan untuk pihak-pihak terkait, khususnya untuk dinas pendapatan daerah kota Batam dalam menentukan kebijakan-kebijakan guna meningkatkan penerimaan pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran.

b. Bagi Universitas Putera Batam

Agar dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa dalam pengembangan ilmu akutansi pemerintah khususnya dalam pengembangan pusat sumber belajar yakni dan sebagai media untuk memperlancar penyelesaian menulis skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan (Peraturan Pemerintah Daerah, 2004) “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut (Halim, A. 2009) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Dengan demikian pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Pemerintah daerah dapat menggali sumber pendapatan asli daerah tersebut secara optimal.

2.1.1.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam (Peraturan Pemerintah Daerah, 2004) tentang Pemerintah Daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan, yaitu:

1. Pendapatan daerah terdiri dari tiga kelompok sebagaimana dibawah ini :

- a. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari pajak dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan-kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
 - b. Dana Perimbangan, dan
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
2. Pembiayaan bersumber dari :
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
 - b. Penerimaan pinjaman daerah
 - c. Dana cadangan daerah
 - d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

2.1.2 Pajak Reklame

Dengan ditetapkannya Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah telah memberikan nuansa baru dimana sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan yang berasal dari pendapatan asli daerah khususnya yang bersumber dari pajak reklame.

2.1.2.1 Objek Pajak Reklame

Menurut (Marihhot P.Siahaan, 2010) objek pajak reklame yaitu seperti berikut:

1. Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Objek Pajak Reklame terdiri dari :

a. Reklame Papan/Billboard

Reklame papan dan/atau billboard adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas plastic fiberglass, kaca batu, logam, alat penyinar atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan, berdiri sendiri atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan.

b. Reklame Kain/Spanduk

Reklame kain/spanduk adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, atau bahan lain yang sejenisnya.

c. Reklame Melekat

Reklame Melekat adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk diletakkan, ditempelkan, dipasang, digantungkan pada satu benda milik pribadi dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm²per lembar.

d. Reklame Selebaran

Reklame Selebaran adalah reklame berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.

e. Reklame Berjalan

Reklame berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling oleh orang berjalan kaki dan atau

ditempatkan atau dipasang pada kendaraan milik pribadi atau badan yang digerakan oleh tenaga hewan atau tenaga mekanik.

f. Reklame Udara/balon

Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan gas, pesawat atau alat lainnya yang sejenis.

g. Reklame Suara

Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang timbul dari atau oleh perantaraan alat atau pesawat pemancar apapun.

h. Reklame film/slide

Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain yang sejenis.

i. Reklame Peragaan

Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagam, mempertontonkan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

3. Tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah :

- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.
- b. Label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.

- c. Nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi tersebut.
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah
- e. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah, misalnya penyelenggaraan reklame yang diadakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan politik tanpa sponsor.

2.1.2.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame

Pemungutan pajak reklame di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Dasar hukum pemungutan pajak reklame pada suatu kabupaten/kota menurut adalah:

- a. (Presiden Republik Indonesia, 2009) Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. (Presiden Republik Indonesia, 2000) yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. (Presiden Republik Indonesia, 2001) tentang Pajak Daerah
- d. Peraturan Daerah kabupaten/ kota yang mengatur tentang Pajak Reklame.
- e. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Reklame sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Reklame pada kabupaten/kota dimaksud.

2.1.2.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame

Menurut (Samudra, 2015) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Jadi setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame disebut sebagai subjek pajak reklame.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Jika reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh Undang-undang dan peraturan daerah tentang pajak reklame. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. (Samudra, 2015)

2.1.2.4 Tarif Pajak Reklame

Pajak reklame memiliki tarif yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Daerah Pasal 50 (Republik Indonesia, 2009) bahwa tarif pajak reklame telah ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Untuk semua objek pajak yang mempromosikan rokok, minuman beralkohol sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikenakan tambahan sebesar 25% dari nilai sewa reklame.

2.1.3 Pajak Hotel

Pengertian Pajak hotel Berdasarkan (Presiden Republik Indonesia, 2009) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 20, “Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel”.

Menurut (Samudra, 2015) Hotel adalah suatu bentuk usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian daripadanya yang khusus disediakan, dimana setiap orang dapat menginap dan makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas-fasilitas lainnya dengan pembayaran.

2.1.3.1 Objek Pajak Hotel

Berdasarkan (Presiden Republik Indonesia, 2009) “Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya.

Serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

2.1.3.2 Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak Hotel

Sesuai dengan (Presiden Republik Indonesia, 2009) diatur mengenai dasar pengenaan Pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya di bayar kepada hotel. Dan tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

2.1.3.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Berdasarkan (Presiden Republik Indonesia, 2009) Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yan mengusahakan hotel. Sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih 10 (sepuluh).

2.1.4 Pajak Restoran

Berdasarkan (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2009) didefinisikan sebagai pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pajak Restoran mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering. Dari berbagai pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran termasuk rumah makan, kantin, warung dan catering.

2.1.4.1 Objek Pajak Restoran

Berdasarkan (Presiden Republik Indonesia, 2009) Objek Pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, pusat jajanan serba ada (*pujasera/food court*), bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering meliputi penjualan makanan dan minuman.

2.1.4.2 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya di terima restoran yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, pusat jajanan serba ada(*Pujasera/foodcourt*),bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Dan tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

2.1.4.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Berdasarkan (Presiden Republik Indonesia, 2009) Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, pusat jajanan serba ada (*pujasera/food court*), bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Sedangkan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, pusat jajanan serba ada (*Pujasera/foodcourt*), bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran.

Dalam penelitian (Kamarullah & Handayani, 2016) dengan judul “Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pajak hotel dan restoran selama tahun 2012- 2014 sebesar 13.18% dan 12.35%. Pajak hotel dan restoran dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari persentase yang disumbangkan pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 5.49% dan 7.50%. Sedangkan, untuk pajak hotel dan restoran rata-rata tingkat efektivitas yang diperoleh sebesar 106.44% dan 105.27%. Hal tersebut membuktikan bahwa tingkat efektivitas sudah sangat maksimal.

Dalam penelitian (Mentari & Rahayu, 2014) dengan judul “Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah sebesar 73,6% dan secara parsial Pajak hotel berpengaruh signifikan secara positif terhadap pendapatan asli daerah dan pajak restoran berpengaruh signifikan secara positif terhadap pendapatan asli daerah.

Dalam penelitian (Mintahari et al., 2014) dengan judul “ Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak

restoran tahun 2012-2014 sangatlah efektif, dengan rata-rata tingkat efektifitasnya adalah sebesar 157,58%. Presentase kontribusi terbesar berada di tahun 2013 sebesar 1,79% dan terendah tahun 2012 sebesar 1,62% dengan rata-rata kontribusi 1,71%. Kontribusi pelanggan tertinggi pada tahun 2014 yaitu Rp.551,503,- dan terendah Rp.210,997,- pada tahun 2012.

Dalam penelitian (Erawati & Hurohman, 2017) dengan judul “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel, pajak penerangan jalan, pajak reklame, dan retribusi Layanan Sampah/ Kebersihan berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bantul.

Dalam penelitian (Indrawan, 2015) dengan judul “Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli kota Bandung. Ada korelasi lemah antara pajak iklan dengan pendapatan asli kota Bandung. Besarnya pengaruh pajak iklan terhadap pendapatan asli kota adalah 4,2%, sedangkan 95,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang diteliti.

Dalam penelitian (Candrasari & Ngumar, 2016) dengan judul “Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya” Hasil dari penelitian menunjukkan potensi pajak tahun 2010-2014 mengalami peningkatan sesuai dengan peraturan pemerintah dalam pemungutan pajaknya. Tingkat efektivitas Pajak hotel sangat efektif ditahun 2012-2014,

peningkatan efektivitas tertinggi pada tahun 2012 sebesar 106,95%. Efektivitas Pajak restoran tahun 2012 sebesar 108,21% menunjukkan peningkatan yang sangat efektif juga terjadi. Meskipun realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran serta realisasi penerimaan PAD meningkat tetapi kontribusi dari tahun 2010-2014 terus menurun, kontribusi Pajak Hotel dan Restoran yang dicapai oleh DPPK Kota Surabaya tetap cukup signifikan dalam memberikan sumbangan peningkatan penerimaan daerah serta pemerintah juga tetap berupaya melakukan pembenahan dalam pemungutan pajaknya.

Dalam penelitian (Razianti, 2015) “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan Periode 2011-2014”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pajak hiburan, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan secara simultan menunjukkan bahwa pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Dalam penelitian (Aznedra, 2017) dengan judul “Pengaruh Kontribusi Penerimaan PaJak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli daerah Di Wilayah Kota Batam Tahun 2012-2014”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pajak restoran sebagian berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan

pajak atas pajak hotel dan restoran berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Dalam penelitian (Riawan, 2014) dengan judul “Kontribusi Pajak Hotel, pajak restoran, dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kulonprogo 2011-2013”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Hotel berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulonprogo, kontribusi Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulonprogo, kontribusi Pajak Reklame berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulonprogo, kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame secara bersama-sama berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulonprogo.

Menurut (Sitompul et al., 2014) “*The Role Of Hotel And Restaurant Taxes And Its Effect On Banda Aceh’s Local Own Source Revenue*”. *The results show that the average contribution of hotel and restaurant taxes is still relatively low. Moreover, the system of tax collection in Banda Aceh has been performed efficiently and effectively. But, there is a gap between the potentiality and the realization of taxes. Furthermore, hotel and restaurant taxes are statistically significant influenced local own source revenue. Therefore, government should pay more attention to improve the tax administration system in the future, enhance the quality of tax administrator, increase tax efforts intensively than extensively, and implement rewards and punishment on the overall systems. In sum, the role and the effect of hotel and restaurant taxes can induce Banda Aceh’s local own source revenue.*

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis	Judul	Variabel	Hasil
(Kamarullah & Handayani, 2016)	Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya	Independen: Pajak hotel, pajak restoran. Dependen: PAD	Pajak hotel dan restoran memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah kurang maksimal.
(Mentari & Rahayu, 2014)	Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung	Independen: Pajak hotel, pajak restoran. Dependen: PAD	Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak hotel berpengaruh signifikan secara positif terhadap pendapatan asli daerah dan Pajak restoran berpengaruh signifikan secara positif terhadap pendapatan asli daerah.
(Mintahari et al., 2014)	Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan	Independen: Pajak Restoran. Dependen: PAD	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran tahun 2012-2014 sangatlah efektif.
(Erawati & Hurohman, 2017)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul	Independen: Pajak penerangan jalan, Pajak Reklame dan Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Dependen: PAD	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel, pajak penerangan jalan, pajak reklame, dan retribusi Layanan Sampah / Kebersihan berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten

			Bantul.
(Indrawan, 2015)	Pengaruh Pajak Terhadap Asli Daerah Bandung	Kontribusi Reklame Pendapatan Kota	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli kota Bandung
		Independen: Pajak Reklame. Dependen: PAD	

2.3 Kerangka Pemikiran

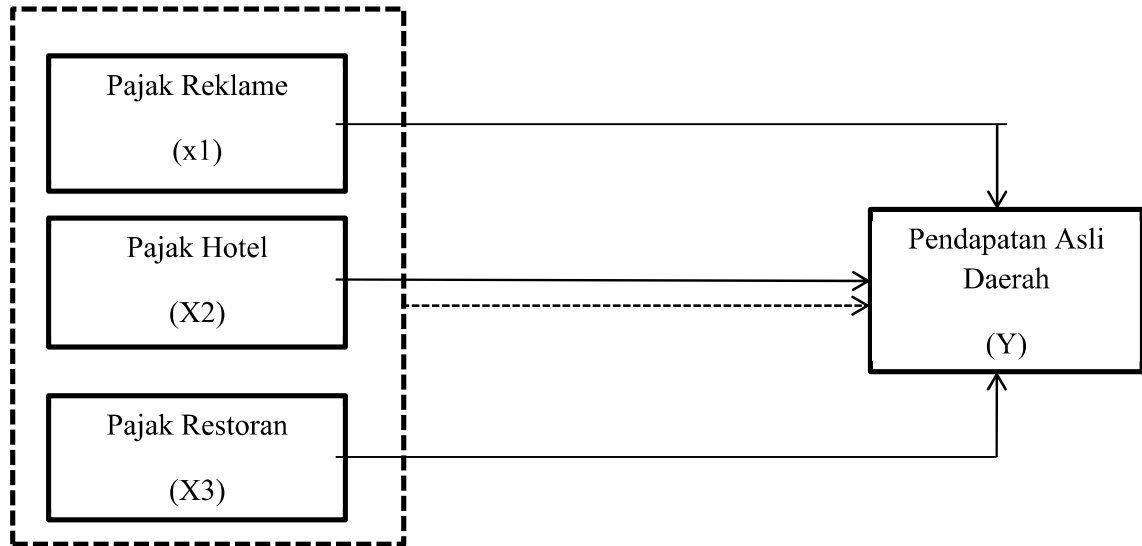
Pada bagian ini akan dijelaskan dan digambarkan satu kerangka pemikiran dari penelitian ini. Kerangka pemikiran tersebut menggambarkan pengaruh variabel independen dengan dependen yaitu kontribusi penerimaan pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah. Kerangka pemikiran tersebut akan dijelaskan pada paragraf-paragraf selanjutnya. Pada bagian pertama menjelaskan pengaruh kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah. Sebagai salah satu sumber potensial dalam penerimaan daerah, Pajak reklame haruslah dikelola secara maksimal. Karena semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak reklame maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan pajak daerah dan akan semakin tinggi pula pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bagian kedua menjelaskan pengaruh kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah. Sebagai salah satu sumber potensial dalam penerimaan daerah, pajak hotel haruslah dikelola secara maksimal. Mengingat pemberlakuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah mengamanatkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran merupakan jenis pajak terpisah dari pajak hotel dan restoran. Karena semakin tinggi pencapaian

penerimaan pajak hotel maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan pajak daerah dan akan semakin tinggi pula pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bagian ketiga menjelaskan pengaruh kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah. Sebagai salah satu sumber potensial dalam penerimaan daerah, pajak restoran juga haruslah dikelola secara maksimal. Karena semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak restoran maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan pajak daerah dan akan semakin tinggi pula pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bagian terakhir menjelaskan pengaruh kontribusi pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelajaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, termasuk diantaranya adalah pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran, yang merupakan jenis pajak daerah dan sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dikarenakan semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan pajak daerah dan akan semakin tinggi pula pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis

Menurut (Sugiyono, 2012:93), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh antara variable X_1 Pajak Reklame, X_2 Pajak Hotel dan X_3 Pajak Restoran terhadap variabel Y Pendapatan Asli Daerah.

Hipotesis di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. H_1 : Pajak Reklame berpengaruh terhadap Pendapatan asli daerah Kota Batam
2. H_2 : Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan asli daerah Kota Batam
3. H_3 : Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan asli daerah Kota
Batam
4. H_4 : Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh terhadap
pendapatan asli daerah Kota Batam

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan yang menggunakan metode yang sistematis untuk memperoleh data yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kausal yaitu penelitian untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas (*independent variable*) terhadap variabel terikat (*dependent variable*). Penelitian ini memerlukan pengujian hipotesis dengan uji statistik.

Rancangan (desain penelitian) pada hakikatnya mencakup abstraksi isi dan ruang lingkup (*the design is content and scope of the study*). Rancangan (desain) penelitian tergantung pula dari pendekatan yang digunakan pada subjek penelitian yang berkaitan dengan eksistensi variabel yang diteliti. Eksistensi yang dimaksud apakah variabel yang akan diteliti dimunculkan secara sengaja (dimanipulasi) oleh peneliti dalam suatu eksperimen atau variabel yang diteliti adalah variabel yang telah ada secara wajar pada subjek yang diteliti. Disamping itu penggambaran konstelasi rancangan penelitian akan dipengaruhi pula oleh jumlah (banyaknya) dan status variabel yang dilibatkan dalam penelitian, sehingga akan terkait dengan identifikasi variabel penelitian dan sudah tentu hipotesis yang dirumuskan (Dantes, 2012, p. 167)

Menurut (Sedarmayanti, 2012, p. 206) dalam desain penelitian perlu memperhatikan hal berikut diantaranya:

a. Ciri rencana desain penelitian

Desain tergantung derajat akurasi yang diinginkan, tingkat pembuktian tingkat perkembangan bidang ilmu bersangkutan, desain dapat berbentuk alternatif, dan desain yang dipilih biasanya merupakan kompromi yang ditentukan oleh pertimbangan praktis.

b. Desain dalam merencanakan penelitian

Dalam merencanakan penelitian, desain dimulai dengan mengadakan penyelidikan dan evaluasi terhadap penelitian yang sudah dikerjakan dan diketahui, dalam memecahkan masalah.

c. Desain pelaksanaan penelitian

Desain pelaksanaan penelitian meliputi proses membuat percobaan/pengamatan dan memilih pengukuran variabel, prosedur dan teknik sampling, alat mengumpulkan data, membuat coding, editing, dan memproses data yang dikumpulkan, termasuk proses analisis data dan membuat laporan.

Desain dalam melaksanakan penelitian terdiri dari:

1. Desain sampel

- a. mendefinisikan sampel
- b. menentukan sampel
- c. menentukan sampel refesentatif

2. Desain instrument/alat

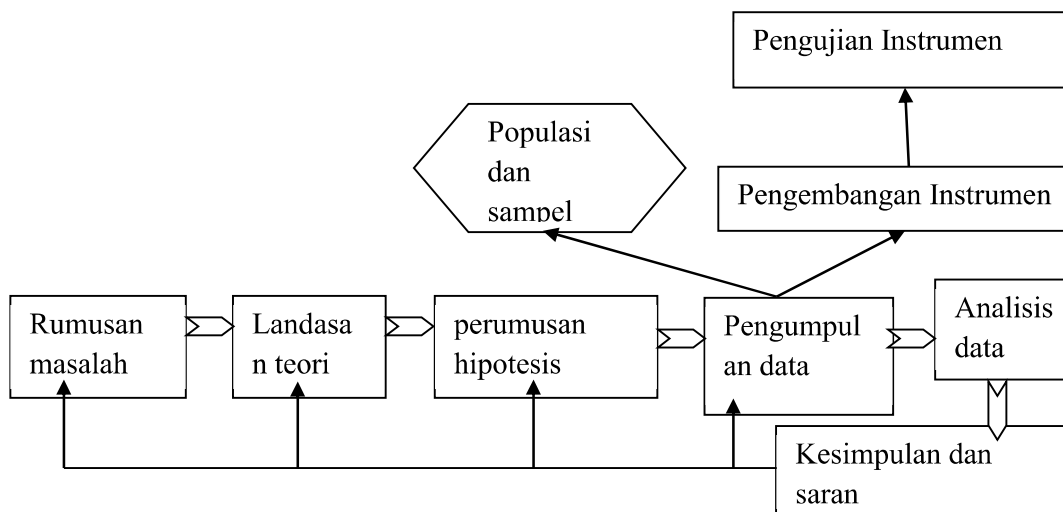
Alat adalah alat untuk mengumpulkan data. Metode penelitian apa saja yang digunakan, masalah desain terhadap alat untuk mengumpulkan data sangat menentukan dalam pengujian hipotesis.

3. Desain analisis

Desain analisis idealnya sudah dikerjakan dahulu sebelum pengumpulan data. Jika desain dalam memformulasikan hipotesis cukup baik, maka desain analisis secara paralel dapat dikembangkan dari desain merumuskan hipotesis. Hipotesis dianggap baik, jika konsisten dengan analisis yang akan dibuat.

4. Jenis desain penelitian

Pengelompokkan desain percobaan menyeluruh belum dapat dibuat dewasa ini, karena masing-masing ahli mengelompokkan jenis desain penelitian sesuai kondisi ilmuan sendiri.



Gambar 3.1 Komponen dan Proses Penelitian Kuantitatif

3.1 Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2014: 38) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen dan variabel dependen.

3.1.1 Variabel Independen (X)

Menurut (Sugiyono, 2014, p. 39) Variabel ini sering disebut variabel stimulus, prediktor, *antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering juga disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Jadi variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran.

3.1.1.1 Pajak Reklame (X_1)

Dengan ditetapkannya Peraturan (Undang-undang Republik Indonesia, 2009) tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah telah memberikan nuansa baru dimana sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan yang berasal dari pendapatan asli daerah khususnya yang bersumber dari pajak reklame. Reklame ialah benda, alat atau perbuatan yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya dengan maksud untuk mencari keuntungan dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

3.1.1.2 Pajak Hotel (X_2)

Menurut (Darwin, 2010) Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan fasilitas lain selama menginap tersebut dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

3.1.1.3 Pajak Restoran (X_3)

Menurut (Darwin, 2010) Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan. Pajak Restoran mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering. Dari berbagai pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran termasuk rumah makan, kantin, warung dan catering.

3.1.2 Variabel Dependen (Y)

Menurut (Sugiyono, 2014), variabel dependen disebut variabel output, kriterian, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah.

3.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah (Y)

Menurut (Halim, 2009, p. 96) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Pemerintah daerah dapat menggali sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut secara optimal.

Untuk lebih jelasnya dalam penelitian ini mengenai variabel independen, variabel dependen dan indikator yang terkait di masing-masing variabel serta skala pengukuran dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
1	Pajak Reklame	Jumlah realisasi penerimaan Pajak Reklame setiap bulan.	Rasio
2	Pajak Hotel	Jumlah realisasi penerimaan Pajak Hotel setiap bulan.	Rasio
3	Pajak Restoran	Jumlah realisasi penerimaan Pajak Restoran setiap bulan.	Rasio
4	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap bulan.	Rasio

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014). Populasi dalam pelaksanaan penelitian dilakukan terhadap keuangan daerah Kota Batam.

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, adapun populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari penerimaan pendapatan asli daerah, Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Batam dari tahun 2012-2017.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi (Martono, 2011, p. 74).

Sampel dalam penelitian ini berupa data realisasi penerimaan daerah Kota Batam sejak tahun 2012 sampai dengan 2017 yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 72 sampel untuk masing masing variabel yang terdiri dari variabel pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara mendasar dan benar. Metode skripsi yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Data Sekunder

Menurut (Indrianto Nur., 2009, p. 147) data sekunder adalah penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

2. Penelitian Kepustakaan

Kepustakaan merupakan bahan utama dalam penelitian data. Dalam hal ini secara langsung penulis memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berasal buku-buku, majalah-majalah, jurnal dan perangkat lainnya yang berkaitan dengan tema skripsi.

3.4 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono analisis data merupakan kegiatan setelah data dari responden atau sumber data lain terkumpul (Sugiyono, 2014). Data yang dihasilkan dari survei dengan menggunakan kuesioner merupakan data statistik. Analisis yang dilakukan haruslah mengikuti kaidah-kaidah statistika.

Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif, dan statistik inferensial. Statistik deskriptif

adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisa data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi.

3.4.1 Analisis Deskriptif

Menurut (Kuswanto, 2012, p. 27) statistika deskriptif merupakan metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Statistika deskriptif hanya memberikan informasi mengenai data yang ada dan sama sekali tidak menarik inferensial atau kesimpulan apapun tentang gugus induknya yang lebih besar. Beberapa statistika deskriptif yang sering muncul diantaranya tabel, diagram, grafik, dan besaran-besaran lain di majalah dan Koran-koran.

Dengan statistika deskriptif, kumpulan data yang diperoleh akan tersaji dengan ringkas dan rapi serta dapat memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Informasi yang dapat diperoleh dari statistika deskriptif ini antara lain ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, serta kecenderungan suatu gugus data.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui kondisi data yang digunakan dalam penelitian. Hal tersebut dilakukan agar diperoleh model analisis yang tepat. Pengujian asumsi klasik meliputi, uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas, uji multikorelasi. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu sebagai berikut:

3.4.2.1 Uji Normalitas

Menurut (Ghozali, 2013) Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residu memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel dependen dan variabel independen pada suatu model regresi mempunyai penyebaran data yang normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

Penelitian ini dilakukan dengan melihat pada grafik histogram yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Apabila distribusi kumulatif dari data sesungguhnya yang ditunjukkan oleh grafik histogram mengikuti pola distribusi kumulatif dari distribusi normal yang ditunjukkan oleh kurva normal, maka model

regresi yang digunakan dalam penelitian ini di anggap layak dan memenuhi asumsi normalitas. Selain dilihat pda grafik histogram, dapat juga dilihat dari grafik *normal probability plot*. Apabila titik-titiknya menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka mode regresi yang digunakan dianggap layak dan memenuhi asumsi normalitas. Dalam uji normalitas residual dengan histogram maupun grafik dapat menyesatkan apabila tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, oleh karena itu untuk melengkapi uji histogram dan grafik dilakukan juga uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistic nonparametric kolmogrov-smirnov (K-S). Uji kolmogrov-smirnov dapat dilakukan untuk menguji apakah residual distribusi secara normal.

3.4.2.2 Uji Multikolinearitas

Menurut (Ghozali, 2013) uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar semua variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

1. Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90) maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolonieritas. Multikolonieritas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.
3. Multikolonieritas dapat dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan lawannya (2) *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multokolonieritas adalah nilai $Tolerance \leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$. Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolonieritas yang masih dapat ditolerir. Sebagai missal nilai *tolerance* = 0,10 sama dengan tingkat kolonieritas 0,95. Walaupun multikolonieritas dapat dideteksi dengan nilai *Tolerance* dan

VIF, tetapi kita masih tetap tidak mengetahui variabel-variabel independen mana sajakah yang saling berkorelasi.

3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali, 2013) Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Kebanyakan data *cross section* mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar).

Menurut (Ghozali, 2013) salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di-*subdentized*. Dasar analisis sebagai berikut:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.4.2.4 Uji Autokorelasi

Menurut (Ghozali, 2013) Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada *problem* autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering di temukan pada data runtut waktu (*time series*) karena “gangguan” pada seseorang individu/kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya. Pada data *cross section* (silang waktu), masalah autokorelasi *relative* jarang terjadi karena “gangguan” pada observasi yang berbeda berasal dari individu atau kelompok yang berbeda. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu Uji Durbin – Watson (DW test).

Nilai d_u dan d_l dapat diperoleh dari tabel statistik durbin watson yang bergantung pada banyaknya observasi dan banyaknya variabel yang menjelaskan (Priyatno, 2010: 87).

$$d = \frac{\sum_{t=2}^n (e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^n e_t^2}$$

Rumus 3.1 Autokorelasi

Keterangan:

d = nilai durbin watson

e = residual

Tabel 3.2 Tabel Durbin-Watson

Durbin – Watson	Kesimpulan
< Di	Terdapat autokorelasi (+)
dL sampai dengan Du	Tanpa kesimpulan
dU sampai dengan 4-dU	Tidak terdapat autokorelasi
4 – dU sampai dengan 4 – dL	Tanpa kesimpulan
>4 – Di	Ada autokorelasi (-)

3.5.3. Uji Pengaruh

3.5.3.1 Metode Regresi Linier Berganda

Menurut (Santoso, 2010) analisis regresi merupakan metode yang digunakan untuk mengembangkan sebuah model (persamaan) yang menjelaskan hubungan antara dua variabel. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi berganda (*multiple regression*), hal ini sesuai dengan

rumusan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian ini. Metode regresi berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dalam suatu model prediktif tunggal. Uji regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh penerimaan kontribusi pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah. Dengan persamaan sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{Pajak Reklame} + \beta_2 \text{Pajak hotel} + \beta_3 \text{Pajak restoran} + e$$

Rumus 3.2
Regresi Linier
Berganda

Y = Pendapatan Asli Daerah

α = Konstanta

β = Slope atau Koefisien Regresi

β_1 = Pajak Reklame

β_2 = Pajak Hotel

β_3 = Pajak Restoran

e = *error*

3.5.4 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan analisis data panel (*pooled data*) yang bertujuan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3.5.4.1. Uji Statistik t (Parsial)

Uji t (*t-test*) digunakan untuk menguji hipotesis parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Menurut (Priyatno, 2010), uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hasil uji t dapat dilihat pada *output coefficients* dari hasil analisis regresi linier berganda. Rumus mencari t_{hitung} adalah sebagai berikut :

$$t_{hitung} = \frac{b_i}{S_{b_i}}$$

Rumus 3.3 t_{hitung}

Keterangan :

b_i = Koefisien regresi variabel i

S_{b_i} = Standar *error* variabel i

Hasil uji ini pada output SPSS dapat dilihat pada tabel *output coefficients*. Nilai dan uji *t-test* dapat dilihat dari p-value pada kolom sig. Kriteria yang menjadi dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

- a. Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.
- b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- c. Jika $P\text{-value} \geq \alpha$ (0,05), maka H_0 diterima, H_a ditolak berarti variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

- d. Jika $P\text{-value} < \alpha (0,05)$, maka H_0 ditolak, H_a diterima berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.4.2. Uji Statistik F (Simultan)

Uji statistik F atau koefisien regresi secara bersama-sama digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y) (Priyatno, 2011: 67).

Menurut (Priyatno, 2010: 67) pengujian simultan bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk menghitung nilai f , dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$F_{hitung} = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Rumus 3.4 F_{hitung}

Keterangan :

F_{hitung} = Nilai F yang dihitung

R^2 = Koefesien determinasi

k = Jumlah variabel bebas (independen)

n = Jumlah sampel

Kriteria pengambilan keputusan yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Jika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima berarti variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.
- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak berarti variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

- c. Jika $P\text{-value} \geq \alpha (0,05)$, maka H_0 diterima, H_a ditolak berarti semua variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- d. Jika $P\text{-value} < \alpha (0,05)$, maka H_0 ditolak, H_a diterima berarti semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.4.3. Koefisien Determinasi

Menurut (Priyatno, 2010: 66). analisis determinasi digunakan untuk mengetahui presentase sumbangan pengaruh variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) secara serentak terhadap variabel dependen (Y). Koefisien ini menunjukkan seberapa besar presentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen.

Menurut (Wibowo, 2012, p. 121), koefisien determinasi (R^2) adalah nilai yang digunakan untuk melihat sejauh mana model yang berbentuk dapat menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Rumus mencari koefisien determinasi (R^2) dirumuskan sebagai berikut :

$$R^2 = \frac{\text{sum of squares Regression}}{\text{sum of square Total}}$$

Rumus 3.5 Koefisien Determinasi

